

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Barang-barang dan jasa-jasa ini diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk Negara tersebut tetapi oleh penduduk negara lain yang bertempat tinggal di negara tersebut (Sukirno, 2005:33).

Salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah atau daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perubahan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno,2006:243). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi perkembangan perekonomian suatu negara. Dimana negara tersebut kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa terus meningkat dari periode ke periode lainnya. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah maupun kualitasnya.

Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara, seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya.

Menurut Todaro (2000:137), terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu:

1. Akumulasi Modal
2. Pertumbuhan Penduduk
3. Kemajuan teknologi

Pembangunan ekonomi adalah usaha - usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Suparmoko, 2002:5). Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi yang lain adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran

dan secara langsung dapat meningkatkan pendapatan nasional dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya dapat dinilai dari besarnya tingkat pertumbuhan PDRB. Pembangunan ekonomi sendiri memiliki tiga sifat penting, yang pertama adalah pembangunan sebagai suatu proses yang berarti merupakan perubahan tahap yang harus dijalani. Kedua, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Ketiga, peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang (Hasibuan, 1987:40-41). Bagi negara berkembang seperti Indonesia, banyaknya aliran modal merupakan kesempatan yang baik untuk memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi daerah dikatakan meningkat jika ada kenaikan PDRB dari tahun sebelumnya. PDRB adalah semua barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada pada suatu daerah tertentu yang dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya oleh berbagai unit produksi dalam satu tahun. Besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bervariasi diakibatkan karena keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor produksi daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Secara tradisional pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan berkelanjutan (Kuncoro, 2004:137), Secara teori semakin besar PDRB, maka akan semakin

besar pula pendapatan yang diperoleh daerah. Dengan semakin besarnya pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh pemerintah pusat akan lebih besar untuk meningkatkan berbagai potensi lokal daerah untuk kepentingan publik.

Pembangunan di Provinsi NTT yang berlangsung secara berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari seluruh Kabupaten/Kota di NTT yang tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Namun di sisi lain, berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

2.2. Belanja Modal

Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan mempertinggi intensitas ekonomi. Menurut (Halim 2004: 73) belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti belanja pemeliharaan dan kelompok belanja administrasi umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 menyebutkan bahwa belanja modal pemerintah adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah

aset tetap dan aset lainnya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) membagi belanja modal menjadi lima bagian yaitu:

1. Belanja modal tanah
2. Belanja jalan, irigasi dan jaringan
3. Belanja gedung dan bangunan
4. Belanja peralatan dan mesin
5. Belanja aset tetap lainnya

Belanja modal berperan dalam peningkatan kualitas layanan publik sekaligus menjadi stimulus dalam perekonomian. Belanja jalan, jaringan, peralatan dan mesin dapat mendorong kelancaran proses usaha sektor swasta guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain hal tersebut, pemerintah juga mengalokasikan belanja peralatan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan serta pendidikan daerah. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 pasal 53 ayat 1, Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Pengelolaan APBD di berbagai daerah masih belum efektif ditunjukkan dengan alokasi belanja pegawai yang terus meningkat dibandingkan dengan alokasi belanja modal untuk

pembangunan daerah yang justru terus menurun. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan belanja modal untuk pembangunan rumah dinas, pengadaan mobil dinas dan pembelanjaan lain yang tidak tepat sasaran. Seharusnya belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatannya, hal ini akan bersinggungan langsung dengan pelayanan publik. Pada prinsipnya alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah atau masyarakat di daerah bersangkutan.

2.3. Tenaga kerja

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut BPS penduduk berumur sepuluh keatas terbagi sebagai tenaga kerja. Dikatakan tenaga kerja apabila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu. Jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2003:59).

Tenaga kerja diduga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimana

Peningkatan tenaga kerja yang diimbangi dengan peningkatan output yang dihasilkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dimaksud. Meningkatnya jumlah tenaga kerja akan memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksinya dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat (Sukirno, 2008:430). Menurut Todaro (2000:112). Pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, dan jumlah tenaga kerja yang lebih besar. Salah satu faktor yang mendukung penyerapan tenaga kerja yang lebih besar adalah upah yang diberikan kepada pekerja/buruh. Pengertian upah menurut Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 Bab 1, pasal 1, ayat 30 : Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dan atau yang akan dilakukan. Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah yang diberikan tergantung pada :

1. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya;
2. Peraturan perundang-undangan yang mengikat tentang upah minimum pekerja;
3. Produktifitas marginal tenaga kerja;
4. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha; dan
5. Perbedaan jenis pekerjaan.

2.4. Investasi

Investasi, yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai” pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan” (Raharja dan Manurung, 2008:11-12). Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah haus dan perlu didepresiasi.

Pengertian Investasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Standar Akuntansi Keuangan “(2009:13:02), yaitu suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Dari pengertian di dapat dinyatakan bahwa investasi adalah sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang

digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi berupa bunga, royalti dan dividen dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan atas dana tersebut di masa yang akan datang.

Menurut Todaro (2000:134-138) investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan dimasa mendatang. Investasi memberikan peranan penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pertumbuhan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan memperluas kesempatan kerja. Persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu daerah menurut Todaro(2000:136) adalah :

1. Akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia;
2. Perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya;
3. Kemajuan teknologi.

Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan pendapatan dikemudian hari. Untuk pembangunan itu seyogyanya menghasilkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudia mengalihkannya untuk investasi dalam bentuk : *Capital Formation*” untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar

Menurut Sukirno (2005:5) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja,

meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Kekurangan modal dalam negara berkembang dapat dilihat dari beberapa sudut:

1. Kecilnya jumlah mutlak kapita material;
2. Terbatasnya kapasitas dan keahlian penduduk;
3. Rendahnya investasi netto.

Akibat keterbatasan tersebut, negara-negara berkembang mempunyai sumber alam yang belum dikembangkan dan sumber daya manusia yang masih potensial. Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas maka perlu mempercepat investasi baru dalam barang-barang modal fisik dan pengembangan sumberdaya manusia melalui investasi di bidang pendidikan dan pelatihan. Hal ini sejalan dengan teori perangkap kemiskinan (*vicious circle*) yang berpendapat bahwa: (1) ketidakmampuan untuk mengarahkan tabungan yang cukup, (2) kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal, (3) taraf pendidikan, pengetahuan dan kemahiran yang relatif rendah merupakan tiga faktor utama yang menghambat terciptanya pembentukan modal di negara berkembang.

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori tersebut

menitikberatkan pada peranan tabungan dan industri sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Arsyad (1997:165). Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa:

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barangbarang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh.
2. Dalam perekonomian dua sektor (Rumah Tangga dan Perusahaan) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada.
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol).
4. Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antar modal dan output (*Capital Output Ratio = COR*) dan rasio penambahan modal-output (*Incremental Capital Output Ratio*)

Teori ini memiliki kelemahan yakni kecenderungan menabung dan ratio penambahan modal-output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang. Demikian pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak konstan, harga selalu berubah dan suku bunga dapat berubah akan mempengaruhi investasi. Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan diasumsikan bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumberdaya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting,

namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Implikasi yang menarik dari teori ini adalah mampu menjelaskan potensi keuntungan dari investasi komplementer (*complementary investment*) dalam modal atau sumber daya manusia, sarana prasarana infrastruktur atau kegiatan penelitian. Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang untuk memperbaiki efisiensi alokasi sumber daya domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang publik (sarana infrastruktur) atau aktif mendorong investasi swasta dalam industri padat teknologi dimana sumberdaya manusia diakumulasikannya. Dengan demikian model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan investasi baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut Ketentuan Umum Permendagri 13/2006, bahwa investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pasal 141 Permendagri 13/2006 menjelaskan bahwa : (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi daerah); dan (2) Pengurangan, penjualan, dan atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal). Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang- Undang No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dengan semakin

besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada disuatu daerah.

2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
Deddy Rustiono, 2008	Analisis pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah	Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Angkatan Kerja (AK) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah (EXPD) terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Sedangkan penambahan variabel <i>dummy</i> krisis menunjukkan pengaruh yang negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Yesika Resianna Barimbing Ni Luh Karmini, 2015	pengaruh PAD, tenaga kerja, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali	1. Pendapatan Asli Daerah, tenaga kerja, dan Investasi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 2. Pendapatan Asli daerah dan tenaga kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Sedangkan investasi berpengaruh positif namun

Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
		tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
Putu Eka Suwandika dan I Nyoman Mahaendra Yasa, 2015	Pengaruh pendapatan asli daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Provinsi Bali Tahun 2008-2012	PAD dan Investasi berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, PAD berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/kota di Provinsi Bali, Investasi berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, PAD berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan Investasi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Bali.
M. Kholiqul Latif dan Yoyok Soesatyo, 2015	Pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri Tahun 2005-2012	Investasi, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Parsial maupun simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri.
Renny, Juni Kamila, 2016	Pengaruh investasi dan UMP terhadap penyerapan tenaga	Investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja

Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
	kerja dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.	melalui pertumbuhan ekonomi dan UMP berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi.
Anasemen, 2009	Pengaruh Belanja Modal Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006	Belanja Modal Pemerintah tidak signifikan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2006.
Purnawati, 2010	Kausalitas penerimaan, belanja dan PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia	Peningkatan belanja modal dapat meningkatkan PDRB sedangkan peningkatan PDRB tidak mempengaruhi peningkatan belanja modal.

2.6. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kerangka berpikir merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup penulisan ini adalah Seluruh Kabupaten/Kota se-NTT, dimana variabel yang diteliti antara lain variabel independen yaitu Belanja modal (X_1), tenaga kerja (X_2) dan Investasi (X_3), sedangkan Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen (Y).

Hubungan antara Belanja modal dengan PDRB yaitu pengeluaran pemerintah dalam alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Melalui peningkatan belanja modal APBD tersebut diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai

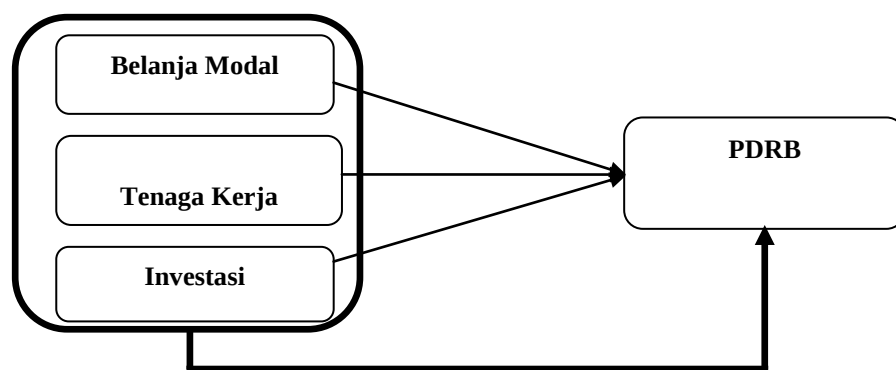
investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk kegiatan produksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara Tenaga Kerja dengan PDRB yaitu tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Pertumbuhan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Akan tetapi permasalahannya adalah sampai berapa banyak penambahan tenaga kerja akan terus meningkatkan output. Kualitas sumber daya manusia dan kemajuan teknologi produksi dan penambahan tenaga kerja akan memacu pertumbuhan PDRB. Namun tidak dapat dipungkiri jumlah tenaga kerja yang dapat dilibatkan dalam proses produksi akan semakin sedikit bila teknologi yang digunakan semakin tinggi. Rahardja (2008:59). Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi dimana apabila jumlah tenaga kerja bertambah maka akan menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara investasi dengan PDRB yaitu hampir semua ahli menekankan arti pentingnya investasi sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Arti pentingnya pembentukan investasi disini adalah bahwa masyarakat tidak menggunakan semua pendapatnya untuk dikonsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabung dan tabungan ini diperlukan untuk pembentukan investasi. Selanjutnya pembentukan investasi ini telah dipandang sebagai salah satu faktor dalam pembangunan ekonomi. Investasi dalam peralatan

modal atau pembentukan modal adalah tidak hanya meningkatkan produksi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memberi kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Prasetyo (2009).

Berikut ini gambaran kerangka teoritis:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran Penelitian

Keterangan :

—————→ : Pengaruh Parsial
 —————→ : Pengaruh Simultan

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan di ambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah, sehingga rumusan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1:

Belanja modal, Tenaga Kerja dan Investasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi NTT.

Hipotesis 2 :

Belanja modal, Tenaga Kerja dan Investasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi NTT.